



Judul : Kinerja DPR : Di Tengah Pandemi Komisi 1 DPR Berniat ke Qatar
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

KINERJA DPR

Di Tengah Pandemi, Komisi I DPR Berniat ke Qatar

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum reda, Komisi I DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Qatar selama lebih kurang satu pekan. Sejumlah elemen masyarakat sipil pemantau kinerja parlemen mempertanyakan urgensi rencana kunjungan kerja tersebut.

Dari informasi yang diperoleh *Kompas*, DPR telah menyurati Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Qatar guna menyiapkan kunjungan kerja itu pada 10 Februari 2021. Surat bernomor PW/01959/DPR RI/II/2020 itu ditandatangani Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Di sisi lain, *Kompas* memperoleh informasi bahwa sejumlah staf di Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar, menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19.

Dalam surat itu disebutkan, rencana kunjungan Komisi I DPR akan berlangsung pada 28 Februari hingga 6 Maret. Agendanya, melaksanakan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN, tugas Dubes RI di Qatar, tugas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, serta pertemuan dengan ketua parlemen Qatar.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis saat dihubungi, Minggu (21/2/2021), membenarkan rencana itu. Namun, realisasi dari rencana tersebut masih menunggu jawaban dari Pemerintah Qatar.

Ia menegaskan, kunjungan itu bukan untuk main-main atau jalan-jalan, melainkan menjalankan tugas pengawasan DPR. "Kalau saya pribadi, sebenarnya malas karena kondisi seperti ini. Dan lagi, saya sudah ke Qatar berkali-kali. Dulu, saat jadi Ketua Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia), berkali-kali saya pameran buku di sana. Jadi, jauhkan anggapan ke sana untuk jalan-jalan," ucapnya.

Soal informasi mengenai Dubes RI di Qatar yang terpapar Covid-19, Kharis membenarkan hal itu. Namun, menurut dia, kondisinya sudah membaik dan statusnya sudah negatif Covid-19 sehingga tak menjadi masalah bagi kunjungan kerja Komisi I. "Masalahnya, apakah kami dapat izin dari Pemerin-

Selama ini ada problem akuntabilitas dalam pelaksanaan kunjungan kerja DPR ke luar negeri.

tah Qatar atau tidak," katanya.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, surat DPR mengenai kunjungan itu baru sebatas penjadwalan. Sebab, dalam masa pandemi, Qatar tidak mengeluarkan visa, tetapi menggunakan *exceptional entry permit* (izin masuk khusus/dengan pengecualian). Izin itu dikeluarkan langsung Pemerintah Qatar. "Pengajuan surat dimaksudkan agar Komisi I dapat menyusun (sebagai panduan) rencana kegiatannya," ujarnya.

Problem akuntabilitas

Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan, selama ini ada problem akuntabilitas dalam pelaksanaan kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Karena itulah, publik kerap mempertanyakan alasan kunjungan DPR ke luar negeri. Hal yang perlu dijelaskan oleh DPR, antara lain, ialah apakah kunjungan itu sesuai dengan kebutuhan yang ingin disasar DPR atau tidak.

Selain itu, di tengah pandemi, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR kerap berkomunikasi dengan parlemen negara lain secara daring. "Kenapa tidak cara-cara BKSAP itu direplikasi?" ujar Hanafi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Albert Purwa pun mempertanyakan urgensi kunjungan kerja ke luar negeri di tengah pandemi, juga alasan dipilihnya Qatar.

"Kenapa harus Qatar yang dikunjungi? Apakah di sana kondisi WNI lebih parah dari negara lain, atau bagaimana? Sebab, masih banyak negara lain yang kondisinya lebih parah daripada Qatar. Kesannya kalau ke sana hanya menghabiskan uang atau anggaran negara," ucap Albert. (REK)